



website. :

<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAMH>

Article Info : Recived : 25 Feb 2026

Revised: 24 Mar 2026

Accepted : 27 Mar 2026

Optimalisasi Tata Kelola Keuangan BUMDes Guna Meningkatkan Daya Saing Dan Terciptanya Kemandirian Desa

Andy Riyanto¹, Abdullah², Dennisha Aulya N. N³, Resti Nur Fitriani⁴, Wawan Setiawan⁵, Masno Marjohan⁶, Rachmawaty Rachmawaty⁷

PT Arianda Putra Pratama¹, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.², PT BPR Sehat Sejahtera³, PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk.⁴, GF Culinary⁵, Universitas Pamulang^{5,6}

Email: ¹⁾andy.riyanto1993@gmail.com, ²⁾abdullahkaban87@gmail.com, ³⁾dennisaulya@gmail.com,
⁴⁾restinf237@gmail.com, ⁵⁾awan.setiawan0303@gmail.com, ⁶⁾dosen00124@unpam.ac.id,
⁷⁾dosen01925@unpam.ac.id

Corresponding Author: andy.riyanto1993@gmail.com

ABSTRAK. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, dalam meningkatkan daya saing melalui aspek utama yaitu Manajemen Keuangan. Permasalahan yang muncul berasal dari keterbatasan kapasitas pengurus BUMDes, belum optimalnya tata kelola keuangan yang masih belum sesuai dengan standar prinsip *Good Corporate Governance*, serta minimnya digitalisasi administrasi dalam kegiatan operasional. Kegiatan ini dilakukan melalui pemaparan materi, diskusi, studi kasus, dan tanya jawab interaktif bersama pengurus BUMDes. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan mampu meningkatkan pemahaman pengurus mengenai standar mutu pencatatan keuangan sederhana berbasis aplikasi, serta pentingnya perencanaan dan pengembangan studi kelayakan bisnis yang dapat diperhitungkan secara profesional untuk mengukur kapan titik impas dalam sebuah lini bisnis yang dijalankan BUMDes. Dengan demikian, kegiatan PKM ini memberikan kontribusi positif pada peningkatan tata kelola, efisiensi operasional, dan kesiapan BUMDes menghadapi persaingan yang lebih luas..

KATA KUNCI: BUMDes, Tata Kelola Keuangan, Manajemen Keuangan, *Good Corporate Governance*, Aplikasi Keuangan BUMDes, Daya Saing.

ABSTRACT. *Community Service Activities (PKM) aim to provide assistance to Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Kopo District, Serang Regency, to enhance their competitiveness through the main aspect of Financial Management. The issues faced include limited capacity of BUMDes management, suboptimal financial governance that does not yet comply with Good Corporate Governance principles, and minimal digitalization of administrative activities in operational processes. This activity is conducted through presentations, discussions, case studies, and interactive Q&A sessions with BUMDes managers. The results indicate that the mentoring successfully improved the managers' understanding of standard simple financial recording practices based on applications, as well as the importance of business feasibility planning and development, which can be professionally calculated to determine the break-even point in the business lines operated by BUMDes. Thus, this PKM activity contributes positively to improving governance, operational efficiency, and BUMDes's readiness to face broader competition.*

KEYWORDS: *BUMDes, Financial Governance, Financial Management, Good Corporate Governance, BUMDes Financial Application, Competitiveness.*

PENDAHULUAN

Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ekonomi desa yang cukup berkembang. Berbagai sektor usaha masyarakat, mulai dari perdagangan, pertanian, hingga layanan jasa, memiliki peluang besar untuk dikembangkan secara optimal melalui lembaga ekonomi desa, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes memiliki peran strategis sebagai instrumen penggerak perekonomian desa yang mampu mendorong lahirnya unit-unit usaha yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi desa (Kementerian Desa PDTT, 2023).

Namun, berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara singkat dengan pengurus BUMDes di Kecamatan Kopo, ditemukan berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas pengelolaan organisasi. Permasalahan tersebut terutama muncul karena tata kelola

BUMDes belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan konsep manajemen modern yang menekankan aspek akuntabilitas, efisiensi, dan orientasi mutu. Hal ini tercermin dari masih adanya unit usaha yang dikelola secara konvensional dan belum memanfaatkan pendekatan manajerial yang terstruktur.

Secara khusus, permasalahan terlihat dari aspek manajemen keuangan. Pengurus BUMDes, meskipun memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan kegiatan, masih menghadapi keterbatasan dalam kemampuan manajerial, terutama dalam pengelolaan keuangan berbasis teknologi sistem aplikasi keuangan. Minimnya pelatihan dan pengetahuan tentang prinsip dasar akuntansi serta penggunaan teknologi digital menyebabkan proses pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual dan belum terstandarisasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, menyulitkan proses

audit, dan mengurangi transparansi pengelolaan dana desa.

Padahal, penerapan sistem aplikasi keuangan sederhana dapat meningkatkan akurasi pencatatan, efisiensi waktu, serta transparansi pengelolaan dana desa secara keseluruhan (Prasetyo & Hidayat, 2019). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan menjadi kebutuhan mendesak bagi pengurus BUMDes di Kecamatan Kopo agar dapat menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengelolaan Keuangan Desa dan Peranannya dalam Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan proses integral yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pelaporan keuangan yang bertujuan untuk mendukung pembangunan desa secara efektif dan efisien (Kusnadi, 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana desa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (Kusnadi, 2018).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen ekonomi desa yang dikelola secara mandiri dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat desa (Sari & Wulandari, 2020). Pengelolaan keuangan yang baik dan profesional sangat penting dalam mendukung keberlangsungan dan keberhasilan operasional BUMDes. *Laeven* dan *Levine* (2009) menyatakan bahwa tata kelola keuangan yang efektif mampu

meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Sistem keuangan yang transparan dan akuntabel juga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat serta meminimalisasi potensi penyalahgunaan dana (Prasetyo & Hidayat, 2019).

Daya saing BUMDes dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan keuangan secara profesional dan inovatif. Porter (1985) menyebutkan bahwa daya saing merupakan kemampuan organisasi untuk mengungguli pesaing melalui keunggulan kompetitif. Pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan BUMDes melakukan investasi tepat, memperluas usaha, dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat (Susanto, 2021). Faktor pendukung keberhasilan pengelolaan keuangan BUMDes meliputi kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, penggunaan teknologi informasi, serta regulasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas (Yuliana & Rahayu, 2020).

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan pengawasan menjadi faktor kunci keberhasilan (Rahman & Ahmad, 2017). Teori manajemen keuangan menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip tersebut, yang juga berlaku dalam pengelolaan BUMDes. Implementasi sistem akuntansi yang sesuai dan pelatihan berkala menjadi faktor penting dalam meningkatkan kompetensi pengelola keuangan desa (Rivai & Sagala, 2020).

Selain aspek keuangan, digitalisasi layanan BUMDes turut berperan dalam memperkuat



efektivitas tata kelola organisasi. Prasetyo dan Sutopo (2021) menegaskan bahwa teknologi informasi dapat mempercepat proses administrasi, meningkatkan transparansi, dan memudahkan pengawasan oleh masyarakat. Penggunaan aplikasi keuangan berbasis digital yang disosialisasikan dalam kegiatan ini berfungsi sebagai alat bantu dalam pencatatan transaksi, manajemen inventaris, serta penyusunan laporan keuangan secara otomatis, yang sejalan dengan tren *e-governance* di tingkat desa.

Secara umum, keberhasilan BUMDes dalam pembangunan ekonomi desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengurus dalam memahami aspek manajerial dan pengelolaan risiko usaha serta memperkuat jejaring kolaborasi dengan berbagai pihak terkait (Kementerian Desa PDTT, 2023). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengelola melalui pelatihan, pendampingan, dan pemanfaatan teknologi digital merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan dan meningkatkan daya saing desa di era modern.

2. Digitalisasi Layanan BUMDes dalam Optimalisasi Tata Kelola Keuangan

Pengaruh digitalisasi dapat kita lihat hampir pada semua sektor produksi dan jasa layanan. Banyak manfaat yang dapat dirasakan dari digitalisasi yang terjadi di era ini. Digitalisasi pada layanan BUMDes melibatkan integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengoptimalkan tata kelola keuangan, seperti melalui sistem akuntansi digital, *e-banking*, dan *platform* manajemen keuangan berbasis *cloud*. Dengan digitalisasi semacam ini memungkinkan transparansi, akurasi, dan

efisiensi dalam pencatatan transaksi, penganggaran, serta pelaporan keuangan, yang mengurangi risiko kesalahan manusia dan korupsi. Adanya digitalisasi pada BUMDes dapat mengadopsi model tata kelola yang lebih baik, seperti penggunaan software akuntansi terintegrasi yang memfasilitasi audit real-time dan pengambilan keputusan berbasis data, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya desa secara efektif. Mengutip publikasi dari *World Bank* (2020) dalam *Digital Transformation in Rural Economies: Opportunities and Challenges*, menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan dapat meningkatkan efisiensi tata kelola hingga 30% di entitas usaha kecil seperti BUMDes.

Peran dalam digitalisasi layanan BUMDes tidak hanya mengoptimalkan tata kelola keuangan tetapi juga memperkuat daya saing desa melalui akses pasar yang lebih luas dan inovasi produk layanan, seperti *e-commerce* untuk produk lokal. Hal ini dapat menciptakan kemandirian desa dengan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, karena pendapatan BUMDes yang dikelola secara digital dapat ditingkatkan melalui analitik data untuk strategi pemasaran yang tepat sasaran. Secara teoritis, pendekatan ini mengikuti konsep "*digital divide reduction*" yang mendorong inklusi ekonomi pedesaan, di mana desa dapat bersaing dengan entitas urban melalui efisiensi operasional dan inovasi berbasis teknologi. Hal ini seperti yang tertuang dalam publikasi UNDP (2019) tentang *Digital Villages: Pathways to Inclusive Rural Development*. Menjelaskan bahwa digitalisasi meningkatkan kemandirian desa dengan potensi pertumbuhan ekonomi hingga 20-25%

melalui optimalisasi keuangan dan akses pasar global.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah metode partisipatif, dimana metode ini berfokus dalam sarana peningkatan peran serta masyarakat secara aktif dalam berbagai proses. *Participatory Rapid Appraisal* (PRA) atau penilaian desa secara partisipatif adalah metode yang tepat diterapkan agar masyarakat mampu mengevaluasi dan menganalisa hidup agar berhasil menyusun rencana dan kegiatan dalam konteks pengetahuan (Chambers dalam Sururi, 2020).

Dalam metode partisipatif metode yang diterapkan dalam pengabdian masyarakat adalah dengan penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan dengan cara:

1. Memberikan penyuluhan kepada pengurus BUMDes yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara tentang tata kelola keuangan BUMDes.
2. Memberikan pendampingan dalam penerapan digitalisasi layanan BUMDes dengan penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan BUMDes yang dikembangkan oleh Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Universitas Pamulang.

Teknik pengumpulan data kegiatan PKM dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

1. Observasi langsung selama kegiatan PKM berlangsung untuk memperoleh gambaran nyata tentang proses pelaksanaan dan partisipasi peserta.

2. Wawancara semi-terstruktur dengan pengurus BUMDes, peserta kegiatan, dan tim pelaksana untuk mendapatkan data mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan tantangan selama kegiatan.
3. Dokumentasi berupa foto, laporan kegiatan, dan instrumen evaluasi seperti kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema "Optimalisasi Tata Kelola Keuangan BUMDes Guna Meningkatkan Daya Saing dan Terciptanya Kemandirian Desa" menghasilkan beberapa temuan penting terkait peningkatan kapasitas pengurus BUMDes. Kegiatan ini memberikan pemahaman, keterampilan, dan wawasan baru yang dapat membantu pengurus BUMDes dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan usaha desa. Hasil dan pembahasan dalam kegiatan ini disusun berdasarkan rangkaian kegiatan, materi yang dipaparkan, respon peserta, serta temuan lapangan selama proses pendampingan berlangsung. Beberapa hasil yang diperoleh dari kegiatan ini antara lain:

1. Sosialisasi dan Pelatihan: Peningkatan Pemahaman Peserta Terhadap Aspek Manajemen Keuangan.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pengurus BUMDes tentang akuntansi dan keuangan yang baik dalam sebuah usaha atau bisnis, kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada tanggal 23 November 2025 yang bertempat di Aula Kantor Desa Ranca Sumur Kec.



Kopo Kab. Serang dan diikuti oleh seluruh pengurus BUMDes se-Kecamatan Kopo yang terdiri 10 BUMDes. Kinerja BUMDes tentu sangat dipengaruhi oleh kinerja manajemen beserta karyawan yang ada. Dengan demikian, jika ingin meningkatkan kinerja organisasi BUMDes maka kemampuan pengurus BUMDes (manajemen dan karyawan) perlu ditingkatkan (Tyasasih & Triska Dewi Pramitasari, 2019).



Gambar 1. Pemaparan Materi Sosialisasi dan Pelatihan tentang Manajemen Keuangan

Dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para peserta tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dalam suatu organisasi termasuk dalam pengelolaan BUMDes sebagai salah satu organisasi yang memiliki unit usaha dan mengelola keuangan pemerintah yang bersumber dari alokasi Dana Desa. Dalam pemaparan materi sosialisasi dan pelatihan tersebut juga dijelaskan tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan pengawasan menjadi faktor kunci keberhasilan. Teori manajemen keuangan menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip tersebut, yang juga berlaku dalam pengelolaan

BUMDes. Implementasi sistem akuntansi yang sesuai dan pelatihan berkala menjadi faktor penting dalam meningkatkan kompetensi pengelola keuangan desa (Rivai & Sagala, 2020). Sehingga dapat digaris bawahi bahwa pengelolaan keuangan yang baik menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan BUMDes.



Gambar 2. Pemaparan Materi Sosialisasi dan Pelatihan tentang Tata Kelola Keuangan BUMDes

Selain memberikan pemaparan materi sosialisasi dan pelatihan tentang manajemen keuangan, kegiatan PKM ini juga memberikan pelatihan dan simulasi langsung kepada para peserta tentang penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan BUMDes yang khusus dikembangkan oleh Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen UNPAM dan diberikan secara gratis kepada seluruh pengurus BUMDes se-Kecamatan Kopo. Para peserta diharapkan dapat mampu membuat suatu pencatatan keuangan BUMDes dengan baik sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas pada BUMDes dapat tercapai. Aplikasi ini akan mempermudah para pengurus BUMDes karena dioperasikan dengan sistem akuntansi sederhana namun mudah digunakan.

Peserta mendapatkan pengalaman langsung dalam melakukan pencatatan



transaksi, penyusunan buku kas, serta pemahaman dasar mengenai penyusunan laporan keuangan sederhana. Pengurus menyadari pentingnya pencatatan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk membangun kepercayaan masyarakat serta memudahkan proses evaluasi usaha.



Gambar 3. Tampilan halaman utama Aplikasi Sistem Keuangan BUMDes

Melalui demonstrasi langsung, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pamulang menunjukkan bagaimana sistem ini mampu mempercepat pekerjaan administrasi keuangan BUMDes, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, serta meningkatkan transparansi dalam pelaporan. Penggunaan aplikasi ini memungkinkan pengurus untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang lebih profesional, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 4. Diskusi interaktif dari Peserta Sosialisasi dan Pelatihan

Bapak Umardiansah, Ketua BUMDes Sinar Bumi dari Desa Cidahu. Beliau menyoroti kendala yang sering muncul di lapangan terkait manajemen keuangan, terutama persepsi masyarakat mengenai waktu pengembalian modal usaha. Banyak yang mempertanyakan mengapa modal tidak segera kembali meskipun usaha telah berjalan. Beliau meminta penjelasan mengenai sistem perhitungan pengembalian modal yang ideal, termasuk estimasi waktu pengembalian yang wajar, baik dalam hitungan bulan maupun tahun berdasarkan karakteristik usaha BUMDes. Pertanyaan ini sangat penting dalam mendukung pemahaman peserta tentang analisis kelayakan usaha, arus kas, serta prinsip *Return On Investment* (ROI).

2. Identifikasi Solusi Konkret

Bapak Andy Riyanto, perwakilan mahasiswa Magister Manajemen menanggapi pertanyaan mengenai lamanya waktu pengembalian modal dalam usaha BUMDes. Bapak Andy Riyanto memberikan penjelasan mengenai pentingnya pencatatan keuangan dan analisis usaha secara sistematis. Ia menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan utama, yaitu menentukan kuantitas barang yang harus

dijual dan menghitung *Break Even Point* (BEP).



Gambar 5. Mahasiswa Magister Manajemen memberikan tanggapan terkait pertanyaan peserta

Bapak Andy Riyanto merincikan bahwa perhitungan BEP dapat dilakukan melalui dua metode, yakni:

BEP kuantitas, yaitu total biaya tetap dibagi selisih antara harga jual dan biaya variabel, sehingga diperoleh jumlah produk yang harus dijual untuk mencapai titik impas.

BEP rupiah, yaitu biaya tetap dibagi dengan persentase margin kontribusi

$(1 - \text{biaya variabel per harga jual})$, sehingga menghasilkan nilai penjualan minimal yang harus dicapai.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa lamanya waktu pengembalian modal sangat dipengaruhi oleh jenis usaha, struktur biaya, dan kecepatan perputaran kas. Dengan demikian, setiap BUMDes perlu melakukan analisis usaha secara berkala untuk memahami kemampuan finansialnya.

Meningkatkan Kesadaran akan Pentingnya Optimalisasi Tata Kelola Keuangan BUMDes Guna Meningkatkan Daya Saing Dan Terciptanya Kemandirian Desa

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan fokus pada optimalisasi tata kelola keuangan BUMDes di Kecamatan Kopo menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kesadaran pengurus desa terhadap pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Melalui serangkaian pelatihan, simulasi penggunaan aplikasi keuangan, serta diskusi interaktif, peserta mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan keuangan desa.



Gambar 6. Foto bersama Mahasiswa, Dosen Pendamping, Pengurus BUMDes dan Alumni.

Pendekatan praktis melalui simulasi aplikasi keuangan memberikan pengalaman langsung dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan sederhana, yang sebelumnya dianggap sebagai hal yang rumit dan sulit dilakukan oleh pengurus desa. Selain itu, kegiatan ini juga menanamkan pemahaman bahwa optimalisasi tata kelola keuangan tidak hanya sekedar pencatatan, tetapi juga meliputi perencanaan anggaran yang matang serta pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana. Dengan demikian, pengurus BUMDes dapat lebih



percaya diri dalam mengelola keuangan usaha desa, sekaligus meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa secara umum.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Optimalisasi Tata Kelola Keuangan BUMDes Guna Meningkatkan Daya Saing Dan Terciptanya Kemandirian Desa” telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas pengurus BUMDes. Melalui rangkaian kegiatan yang meliputi penyampaian materi, simulasi penggunaan aplikasi keuangan, diskusi interaktif, serta pendampingan teknis, peserta memperoleh pemahaman yang lebih terarah mengenai pengelolaan organisasi dan pengembangan unit usaha berbasis tata kelola yang baik.

Kegiatan ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, pemahaman pengurus mengenai perencanaan dan pengelolaan perencanaan dan tata kelola keuangan meningkat, terutama dalam hal pencatatan bukti transaksi, pengembangan

pengetahuan tentang aplikasi keuangan, dan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Kedua, kemampuan pengurus dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan menunjukkan peningkatan melalui paparan presentasi mengenai aplikasi digital yang membantu menciptakan proses kerja administrasi yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Ketiga, peserta memperoleh wawasan baru mengenai penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan BUMDes dengan operasi yang sederhana dan mudah digunakan.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini berhasil menjadi sarana penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes, membuka wawasan baru bagi pengurus, dan memberikan fondasi awal bagi pembenahan tata kelola organisasi. Dampak tersebut diharapkan dapat mendukung BUMDes dalam meningkatkan daya saing, membangun kepercayaan masyarakat, dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim. (2018).** Tata kelola keuangan yang baik sebagai indikator keberhasilan lembaga pengelola dana publik. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 12(3), 45-58.
- Kementerian Desa PDTT. (2023).** Laporan Tahunan Program Pengembangan BUMDes. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kusnadi. (2018).** Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 123-135.
- Laeven, L., & Levine, R. (2009).** *Bank governance, regulation and risk taking. Journal of Financial Economics*, 93(2), 259–275.
- Porter, M. E. (1985).** *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press.*
- Prasetyo, B., & Hidayat, R. (2019).** Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 21(1), 65-78.
- Prasetyo, B., & Sutopo, A. (2021).** Digitalisasi layanan BUMDes sebagai upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi. *Jurnal Teknologi dan Pembangunan Desa*, 5(2), 89-102.
- Rahman, A., & Ahmad, S. (2017).** Prinsip pengelolaan keuangan desa berbasis tata kelola organisasi. *Jurnal Manajemen Organisasi*, 10(4), 234-245.
- Rivai, V., & Sagala, R. (2020).** Pelatihan keuangan sebagai peningkatan kapasitas pengelola BUMDes. *Jurnal Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 14(3), 150-165.
- Sari, N., & Wulandari, D. (2020).** Peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi desa. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Desa*, 8(1), 33-45.
- Susanto, D. (2021).** Pengelolaan keuangan yang profesional dan inovatif dalam BUMDes. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Desa*, 9(2), 112-125.
- Yuliana, R., & Rahayu, S. (2020).** Faktor pendukung optimalisasi tata kelola keuangan BUMDes. *Jurnal Pengelolaan Keuangan Desa*, 7(3), 77-89.
- UNDP. (2019).** *Digital Villages: Pathways to Inclusive Rural Development. United Nations Development Programme.*